

Dana Desa Beji yang Hilang Misterius Kini Berujung Dugaan korupsi



Ilustrasi: www.harianjogja.com

GUNUNGKIDUL—Kasus hilangnya dana desa¹⁾ di Desa Beji, Ngawen, Gunungkidul akan berlanjut ke proses penyidikan. Hilangnya uang ratusan juta tersebut masih menjadi teka-teki sampai saat ini.

Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Gunungkidul Iptu Wawan Anggoro mengatakan kasus hilangnya uang sebesar Rp230 juta tersebut masih dalam pencarian.

Kronologi uang yang hilang sekitar dua bulan lalu tersebut yaitu ketika bendahara desa²⁾ berinisial SW ditugaskan mengambil dana desa tersebut dari bank. “Bendahara desa tersebut ditugaskan mengambil dana desa tersebut, yang pertama Rp60 juta pada 20 November 2017, di hari berikutnya Rp170 juta,” ujarnya Kamis, (4/1/2018).

Dari keterangan saksi dikatakan oleh Wawan, bahwa SW mengaku tiba-tiba hilang ingatan atau tidak sadar saat makan sate di salah satu warung di Gunungkidul setelah mengambil uang di hari kedua. SW mengaku ketika sadar sudah berada di Purworejo, Jawa Tengah.

Setelah itu dirinya mengatakan menghubungi istrinya di rumah dan menanyakan uang tersebut, sang istri pun juga bingung karena tidak mengetahui uang tersebut berada di mana.

Namun Wawan mengatakan tidak begitu saja percaya, karena ketika hilang tidak langsung melaporkan ke kepolisian. Selain itu uang di hari pertama yang diambil juga tidak langsung disetorkan.

Dikatakan Wawan hari ini akan masuk proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Namun sementara untuk membuktikan adanya korupsi, harus ada niat memperkaya diri sendiri. Ia juga mengatakan berkordinasi dengan kejaksaan untuk mencari bukti-bukti atau data.

Sementara itu kepala desa Beji, Suparno mengatakan tidak mengira ada oknum staf-nya yang nakal. “Ya enggak kepikiran kalau bakal seperti itu karena di awalkan baik-baik saja,” ujarnya.

Saat ini dikatakannya ada surat perjanjian terkait kasus ini, dimana SW akan mengembalikan uang itu. Jika tidak kasus tersebut akan terus berjalan ke ranah hukum. SW pun kini telah dinonaktifkan dari pemerintahan desa.

Sumber Berita:

1. Harianjogja, Tanggal 4 Januari 2018: Dana Desa Beji yang hilang misterius kini berujung dugaan korupsi
2. Jateng Pos.Com, Tanggal 4 Januari 2018: Dana Desa Beji yang hilang misterius kini berujung dugaan korupsi.
3. Harianjogya, Tanggal 5 Januari 2018: Bendahara dana desa mengaku hilang ingatan

Catatan :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara . menyatakan :
 - a) Pasal 53 ayat (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada kuasa Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah.
 - b) Pasal 59 ayat (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau secara langsung merugikan keuangan negara wajib mengganti kerugian tersebut.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan: Pasal 7 ayat 1 menyatakan : Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan dan Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
2. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 7 ayat (1) dan (2) menyatakan : Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan dan Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

-
- 1) Dana Desa adalah Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
 - 2) Bendahara desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa..